

Budaya Politik dan Pendidikan

Luthfiyah

Kandidat Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

Abstract: The occurrence of various crises in this nation allegedly stems from a crisis of conscience which almost all citizens, especially entering the stakeholders in this country. Multidimensional crisis this nation will never be solved humanely if no action is carried out systematically and thoroughly. This paper reviews how to find a way out to solve the problem from the standpoint of education. This paper describes how the process of political education in order to strengthen the power of conscience, how good the actual socialized education in political education in society and in educational institutions themselves to be able to restore the essence of the political aspects, and assist the establishment of a civilized nation.

Keywords: *Culture, Politics, and Education.*

Pendahuluan

“Indonesia baru” seperti yang dicita-citakan banyak orang dengan lahirnya *civil society*. Hal ini berarti bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat tidak lagi menjadi objek, tetapi sebagai subjek pelaku kekuasaan. Masyarakat madani hanya dapat terwujud bila masyarakat memperoleh pendidikan yang memadai, sehingga masyarakat dapat memahami perannya dalam proses perubahan sosial secara kreatif-konstruktif untuk mencari bentuk-bentuk sintetik baru secara tulus, damai sekaligus mencerahkan.¹

Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan berpihak pada proses pemberdayaan rakyat dengan memprioritaskan pada bidang pendidikan. Kesejahteraan rakyat seharusnya diartikan dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang terdidik agar mampu meningkatkan penghasilannya secara benar, mandiri dan kreatif. Ukuran kesejahteraan rakyat harus menyertakan indikator menguatnya etika sosial, kualitas partisipasi rakyat dalam politik, kreativitas budaya dan komitmen

moralitas keagamaan dan kemanusiaan universal, tidak semata-mata menggunakan indikator ekonomi,² meskipun ekonomi memang menjadi salah satu indikator di dalamnya.

Sebagaimana Kuntowijoyo menyatakan bahwa ukuran kemajuan masyarakat bukan hanya dengan melihat pertumbuhan ekonomi atau keadaan luar. Ukuran kemajuan adalah bertambahnya iman, "*wama zadabum illa imana*" (Q.S. *al-Abzab: 22*). Keadaan luar itu adalah kondisi yang perlu (*necessary condition*) tetapi itu saja tidak cukup karena ekonomi bukan suatu kondisi yang dapat mencukupi (*sufficient condition*).³ Kenyataan menunjukkan banyak orang yang berkecukupan secara materi, namun kehidupan yang dijalannya tidak menunjukkan kebahagiaan. Bahkan, tak jarang karena ekonomi orang justru lupa diri. Oleh karena itu, perubahan keadaan di dalam (perubahan hati) itulah yang sejati dan esensial. Tujuan akhir dari suksesnya pembangunan adalah perubahan kesadaran setiap individu. Perubahan kesadaran jauh lebih permanen daripada perubahan secara material.

Pendidikan sebagai salah satu faktor penentu dan indikator kemajuan bangsa hendaknya menjadi tujuan pembangunan. Melalui pendidikan, diharapkan para pelaku politik di negeri ini bisa lebih memahami posisi sekaligus tugas dan tanggung jawab yang diemban bagi kesejahteraan rakyat. Setiap orang yang berkecimpung di dunia politik menyadari hakikat berpolitik. Pendidikan yang dimaksud tentunya meliputi segala aspek yang dapat memberikan pemahaman baru mengenai apa, untuk apa, bagi siapa sesuatu (kekuasaan) harus dicapai dan dipertahankan.

Idealitas dan Realitas Budaya Politik

Budaya politik didefinisikan oleh Almond dan Verba sebagai sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu.⁴ Pengertian budaya politik ini membawa pada pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi individu. Sebagai sistem, organisasi politik hendaknya memiliki orientasi yang hendak mengupayakan kesejahteraan warga negara. Adapun aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan adanya fenomena dalam masyarakat tertentu

yang semakin mempertegas bahwa masyarakat secara keseluruhan tidak dapat terlepas dari orientasi individu. Hakikat politik sebenarnya bukan berorientasi pada individu pemegang kekuasaan dalam politik, melainkan kesejahteraan rakyatlah yang menjadi orientasinya.

Objek politik menurut Albert dan Verba mencakup tiga komponen, yaitu: kognitif, afektif, dan evaluatif.⁵ Komponen kognitif digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki sistem politiknya secara keseluruhan. Komponen afektif berbicara tentang aspek perasaan seorang warga negara, yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik tertentu. Sikap yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam keluarga atau lingkungan seseorang juga dapat mempengaruhi pembentukan perasaan tersebut. Sementara itu, komponen evaluatif ditentukan oleh evaluasi moral yang dimiliki seseorang. Di sini, nilai moral dan norma yang dianut dapat menentukan serta akan menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik. Oleh karena itu, diperlukan penanaman nilai-nilai moral bagi masyarakat agar dapat menilai dan memihak dengan benar, dan arif.

Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar semua tindakan. Karena itu, dalam menuju arah pembangunan dan modernisasi, masyarakat akan menempuh jalan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Hal itu terjadi karena peranan kebudayaan sebagai salah satu faktor. Budaya politik ini dalam derajat yang sangat tinggi dapat membentuk aspirasi, harapan, preferensi dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik.⁶ Setiap masyarakat memiliki *common sense* yang bervariasi dari satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, yang berimplikasi pada perbedaan persepsi tentang kekuasaan, partisipasi, pengawasan (kontrol) sosial serta kritik masyarakat.

Wilayah politik, baik pada dataran praktis maupun teoretis adalah wilayah yang berkaitan dengan etika karena politik berkait erat dengan berpikir dan berperilaku dalam hubungannya dengan kekuasaan, baik untuk mendapatkan atau mengelolanya. Etika politik tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian

dari etika kekuasaan secara universal.⁷ Politik tidak hanya berurusan dengan kepentingan-kepentingan dan kekuasaan, tetapi juga dengan asas-asas moral, dengan nilai-nilai kepentingan nasional, kesejahteraan umum dan kehormatan nasional.⁸ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai moralitas menjadi asas penting dan niscaya dalam politik. Tanpa moral, politik hanya akan menjadi salah satu bentuk penyengsaraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan politik, seringkali muncul fenomena politik kekuasaan, bukan politik moral,⁹ yaitu tindakan politik yang semata-mata untuk merebut dan memperoleh kekuasaan karena dengan kekuasaan politik yang dimilikinya. Seseorang atau kelompok akan memperoleh keuntungan materi, popularitas dan fasilitas yang membuat hidupnya serba berkecukupan selain untuk perolehan status sosial yang tinggi. Dalam format politik yang demikian, dapat dipastikan siapapun akan mengorbankan apa saja dan dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan politiknya. Dengan kata lain, kekuasaan adalah segala-galanya, sehingga harus diperjuangkan mati-matian.

Dalam politik moral, kekuasaan bukan tujuan akhir, tetapi sebagai alas perjuangan untuk mewujudkan cita-cita moral kemanusiaan. Kekuasaan yang hendak dicapainya tidak diperoleh dengan menghalalkan segala cara, tetapi dicapai melalui cara-cara yang bijak, sah dan sehat secara prosedural, dibenarkan secara moralitas kemanusiaan dan kepatutan sosial. Politik moral ini seharusnya menjadi tujuan yang mesti dicapai oleh politisi sejati. Hal ini dengan harapan jalannya pemerintahan akan lebih sehat, kuat, terkontrol dan berlangsung untuk kepentingan rakyat yang lebih baik secara jasmani, rohani dan intelektual.

Sejak pembahasan pertama oleh dua filsuf Yunani klasik, Plato dan Aristoteles, mengenai hakikat kegiatan politik berkaitan dengan masalah moral. Politik didefinisikan sebagai keprihatinan pada isu-isu umum yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan komunitas. Mereka membedakan kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Kepentingan umum dipandang sebagai hal yang lebih tinggi secara moral. Aristoteles menyatakan, manusia adalah makhluk politik; sudah menjadi pembawaannya hidup dalam suatu *polis*. Hanya dalam *polis*, manusia dapat mencapai nilai moralnya yang paling tinggi. Di luar *polis*, manusia dapat menjadi *subhuman* (binatang buas) atau *superhuman* (Tuhan).¹⁰

Lebih lanjut, Aristoteles dan Plato memandang politik terutama dalam kerangka tujuan-tujuan moral yang harus dikejar oleh para pengambil kepu-

tusan. Adanya *polis* untuk mencari kebaikan bersama, kebajikan masyarakat dan kesempurnaan moral. Para pemimpin politik mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan, yang bukan sekadar kenikmatan hedonistik, melainkan kesesuaian gagasan dan tindakannya. Oleh karena itu, perilaku mereka harus dinilai berdasarkan kriteria etis, yaitu hanya memenuhi kepentingan pribadi atau melayani kepentingan umum.

Senada dengan hal tersebut, filsuf politik Amerika, John Rawls, memaparkan bahwa teori keadilan yang menjadi landasan untuk menerapkan dan menilai kegiatan-kegiatan politik. Berdasarkan konsepnya, keadilan terdiri atas kemerdekaan dan persamaan. Setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar menurut hukum, meliputi kebebasan mengemukakan gagasan, berbicara, berorganisasi dan memberikan suara.¹¹ Dengan demikian, kegiatan politik harus berusaha untuk mewujudkan kepentingan bersama sekaligus upaya penegakan unsur-unsur keadilan. Bukan seperti yang seringkali dipertontonkan oleh para politisi, yang menggunakan konsep kepentingan umum sebagai topeng untuk membenarkan kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan. Kesejahteraan dan keadilan bukan saja milik para pemangku politik yang berkuasa melainkan juga hak seluruh masyarakat.

Dalam budaya politik, birokrasi pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga kini masih belum bergeser dari paradigma kekuatan, bukan pelayanan. Dalam paradigma kekuasaan terkandung hak-hak untuk mengatur dan untuk itu mereka memperoleh sesuatu dari mereka yang diatur. Rakyat sebagai pihak yang dikuasai, bukan yang menguasai. Karena itu, rakyat harus memberikan sesuatu kepada penguasa agar dapat melayaninya. Fenomena sosial menunjukkan betapa rakyat dibuat sibuk luar biasa oleh aparat pemerintah untuk upacara penyambutan presiden, sebagai penguasa tertinggi di negeri ini yang berkunjung ke daerah kekuasaannya.¹² Demikian pula ketika para petinggi pemerintahan lain berkunjung, pengadaan acara-acara seremonial dan pengagungan simbol-simbol menjadi momen penting yang menghabiskan banyak dana dan sebenarnya, kurang bermanfaat.

Affan Gaffar mengemukakan bahwa budaya politik masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu hierarki tegar, *patronage (patron-client)*, dan *neopatrimonialistik*.¹³ Hierarki yang tegar memisahkan antara pemegang kekuasaan

dengan rakyat sehingga kalangan birokrat sering menampakkan diri dengan *self-image* yang bersifat *benevolent*. Mereka seolah-olah kelompok pemurah, baik hati dan pelindung rakyat, maka sudah seharusnya rakyat patuh, tunduk dan setia pada penguasa.

Budaya politik *patronage* sebagai budaya yang paling menonjol. Pola hubungannya bersifat individual antara si Patron dan si Klien (majikan dan pembantu, atau atasan dan bawahan). Antara keduanya terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan kekuasaan, kedudukan, jabatan dengan tenaga, dukungan, materi, dan loyalitas. Budaya neo-patrimonialistik terjadi karena negara memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik, seperti birokrasi, di samping juga memperlihatkan atribut yang bersifat patrimonialistik.

Sementara Nurcholish Madjid menyatakan bahwa sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia adalah sistem politik yang tidak hanya baik untuk umat Islam, tetapi yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia.¹⁴ Artinya, cita-cita politik seharusnya bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama secara kemanusiaan, tidak hanya menguntungkan kelompok atau golongan, terlebih individu tertentu sebagai pemegang kekuasaan.

Apapun budaya politik yang dianut, yang terpenting bahwa penguasa politik jangan menjauh dari realitas rakyat yang telah memilihnya. Pemilihan umum yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat hanya terhenti pada perjuangan rakyat mempertahankan figur/tokohnya. Setelah menjadi pemimpin, mereka lupa dan tidak lagi peduli pada rakyat. Demokrasi akan sulit terwujud bila kekuasaan masih didominasi oleh sistem feodal dan patrimonial-irrasional.

Peran Pendidikan dalam Mewarnai Budaya Politik

Krisis bangsa ini berpangkal dari krisis hati nurani dan kekuasaan hati nurani. Krisis nurani para pemegang dan pengelola kekuasaan, baik yang ada di puncak maupun struktur yang ada di bawahnya. Kekuasaan telah menggelapkan hati nuraninya sendiri. Akibatnya, fitnah, khianat, muslihat, dan licik dipandang sebagai hal yang wajar dalam politik. Ironisnya, yang menjadi budaya dalam perpolitikan menganggap bahwa kepiawaian seseorang dalam melakukan liku-liku licik itu adalah kepiawaian dalam berpolitik.

Jika pandangan ini yang menjadi acuan setiap pemegang kekuasaan, akibatnya krisis bangsa yang sudah multidimensi ini tidak akan pernah terselesaikan secara manusiawi. Kacah politik bangsa akan terus merajalela dan rakyatlah yang akan terus menjadi korbannya. Perpolitikan telah mengalami degradasi moral yang menghancurkan derajat kemanusiaan dan merusak aspek kehidupan masyarakat.¹⁵ Oleh karena itu, proses pendidikan politik untuk memperkuat kekuasaan hati nurani perlu disosialisasikan secara aktual, baik dalam pendidikan politik di masyarakat maupun di lembaga pendidikan itu sendiri.

Aktualisasi pendidikan politik menuntut untuk segera diaplikasikan dalam seluruh jenjang pendidikan. Hal itu dilakukan sedini mungkin pada setiap individu ditanamkan sikap terbuka, jujur, menghargai dan mau mendengarkan pendapat orang lain, pembiasaan hidup disiplin serta pemahaman makna hak dan tanggung jawab. Dalam kaitan ini, diharapkan nilai-nilai ini dapat menjadi jati diri yang terus dimiliki dan teraplikasikan dalam kehidupan. Penanaman nilai-nilai ini dapat dilakukan secara serentak oleh guru, orangtua dan lingkungan yang mengitarinya. Upaya yang lebih efektif, yakni dengan pemberian contoh teladan (*uswah hasanah*) pada anak dalam kehidupan sehari-hari karena jika hanya dengan teori saja, konkrititas moral tersebut tidak akan ditemukan.

Tantangan utama politik di Indonesia adalah kekerasan dan ketidakadilan, dan hal itu diakibatkan oleh praktik politik kekuasaan. Politik yang identik dengan kekuasaan, dijalankan bukan atas dasar etika politik, tetapi untuk mempertahankan kekuasaan. Banyak konsesi diberikan dengan mengorbankan tujuan utama politik itu sendiri, yaitu kesejahteraan bersama. Haryatmoko menyatakan bahwa budaya politik tidak bisa dilepaskan dengan etika politik, yang mengandaikan aspek normatif (moral dan etika), kaidah kebudayaan (kejujuran dan keadilan) dan peduli terhadap pembinaan nilai-nilai dan perwujudan cita-cita.¹⁶ Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya mengembalikan hakikat aspek-aspek politik, agar dapat membantu terwujudnya bangsa yang *civilized*, meskipun membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan perlu perjuangan lebih dari satu generasi (bersifat evolusioner).

Salah satu cara untuk mengalami demokrasi dan menjadi *civilized* adalah melalui pendidikan kewargaan. Di dalam pendidikan kewargaan terkandung

makna sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, nilai, sistem, budaya serta praktik demokrasi dan keadaban.¹⁷ Postulat yang berada di balik penerapan pendidikan kewargaan antara lain bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi harus diajarkan, disosialisasikan dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan.

Pendidikan kewargaan sudah sangat mendesak untuk segera dilakukan. Hal ini mengingat masa transisi menuju demokrasi mengalami beragam patologi sosial yang terjadi di tengah masyarakat seringkali kontra-produktif dengan upaya penegakan demokrasi itu sendiri. Di antara patologi sosial yang terjadi antara lain: hancurnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, memudarnya kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas, kemerosotan nilai-nilai toleransi, memudarnya nilai-nilai kejujuran, kesopanan, dan rasa tolong-menolong, melemahnya nilai dalam keluarga, maraknya praktik KKN dalam pemerintahan, kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan itu sendiri.

Oleh karena itu, pendidikan yang dikembangkan di Indonesia perlu mengembangkan nilai-nilai fundamental masyarakat sesuai dengan dinamika perubahan sosial yang terjadi begitu cepat, agar nilai-nilai tersebut dapat menemukan relevansinya, untuk kemudian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan problem masyarakat. Pendidikan bukan hanya berupa pemberian konsep-konsep yang "melangit" karena realitas yang dihadapi masyarakat merupakan realitas yang ada di bumi. Materi-materi yang diberikan jangan hanya memuat ajaran yang dihafalkan tanpa menyentuh kehidupan yang riil. Dengan demikian, ketika dihadapkan pada permasalahan, materi yang diperoleh tidak mampu memberikan jawaban dan solusi. Akibatnya, masyarakat bertindak di luar perolehan proses pendidikan. Dengan lain perkataan, pendidikan yang diperoleh merupakan *syai-un* dan realitas kehidupan yang dihadapi merupakan *syai-un akbar*.

Musa Asy'arie mengatakan bahwa pendidikan yang ada saat ini masih bersifat "anti-realitas".¹⁸ Dunia pendidikan yang ada masih mengajarkan teori-teori belaka tanpa memberikan kesempatan kreatif untuk bergumul dan memahami realitas secara intensif. Padahal, ilmu merupakan objektivikasi intelek terhadap realitas yang ditangkap dalam momen kehidupan tertentu, baik ruang maupun

waktu, yang diabstraksikan melalui logika dan diformulasikan menjadi rumusan dalil atau teori. Hal itu harus dipahami bahwa realitas yang ada berubah terus menerus, dinamis dan bersifat terbatas. Karena itu, yang diperlukan bukan menghafal teori, tetapi pemahaman terhadap realitas. Selain anti-realitas, pendidikan sekarang ini juga hanya mementingkan hasil dengan melupakan proses. Tujuan dalam menempuh pendidikan hanya cara untuk memperoleh ijazah dan gelar akademik yang dipuja dan menjadi kebanggaan. Pendidikan tidak lagi menganggap penting proses pembelajaran yang kreatif dan visioner, baik untuk memperkaya khazanah intelektual maupun spiritual. Akibatnya, tanpa rasa malu dan beban moral, banyak orang berlomba-lomba meraih gelar akademik dengan "jual-beli" ijazah, tanpa melalui studi panjang yang berjenjang.

Kemudian tak jarang pula dijumpai praktik-praktik yang berlawanan dengan etika dan moral justru terjadi dalam institusi pendidikan. Fenomena perkelahian, budaya kekerasan, praktik penipuan dan KKN, pengekangan kebebasan (berpikir, berkeyakinan, berpendapat, berbeda, dan sebagainya). Pendidikan tidak lagi mengandung unsur-unsur yang humanis dan memanusiaikan manusia. Hal ini menunjukkan betapa pendidikan sudah melenceng dari nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi dan sebagai sarana pewarisan budaya dan moral luhur bangsa.

Penutup

Budaya politik di Indonesia menunjukkan pergeseran dari nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi tiang penyangga politik. Politik yang sebenarnya bertujuan mencapai kesejahteraan rakyat telah berubah menjadi ladang pengerukan materi (memperkaya diri) dan sarana penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Dengan fenomena budaya politik feodal dan masih bersifat patron-klien, berarti tidak ada kesesuaian antara idealitas yang diharapkan dengan realitas yang terjadi, sehingga aspek yang perlu dibenahi dan diharapkan mampu memperbaikinya adalah melalui pendidikan.

Pendidikan yang dapat mengembalikan hakikat budaya politik tersebut adalah pendidikan yang bukan sekadar menjadi *banking-process*, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, humanis, tidak anti-realitas, mengutamakan proses daripada hasil serta penyelarasan antara hak dan tanggung jawab.

Walaupun hal ini memerlukan proses yang evolusioner, karena tidak mungkin bila dilakukan secara revolusioner, tetapi kalau tidak pernah dimulai maka akan semakin jauh dari harapan, terlebih kenyataan.

Endnotes

- ¹ Musa Asy'arie, *Keluar dari Krisis Multidimensi* (Yogyakarta: LESFI, 2001), hal. 53.
- ² *Ibid.*, hal. 54.
- ³ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), hal. 11-13.
- ⁴ Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture* (Princeton: Princeton University Press, 1963), hal. 13-15.
- ⁵ Nazaruddin Sjamauddin, "Aspek-Aspek Budaya Politik Indonesia", dalam Alfian dan Nazaruddin Sjamauddin (Ed.), *Profil Budaya Politik Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991), hal. 21-22.
- ⁶ Yahya Muhaimin, "Persoalan Budaya Politik Indonesia" dalam Alfian dan Nazaruddin Sjamauddin (Ed.) *Ibid.*, hal. 52.
- ⁷ Musa Asy'arie, *NKRI, Budaya Politik dan Pendidikan* (Yogyakarta: LESFI, 2005), hal. 119.
- ⁸ Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 6.
- ⁹ Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir* (Yogyakarta: LESFI, 2002), hal. 107-109.
- ¹⁰ Dari istilah *polis* (tatanan politik) muncul beberapa kata kunci konsep politik, di antaranya: politea, konstitusi, polites, warga negara, politikus dan negarawan. Walaupun *polis* telah diterjemahkan sebagai "negara kota", penafsiran bangsa Athena mengenai politik lebih menunjuk pada proses yang digunakan orang untuk memperdebatkan hal-hal yang berkaitan dengan keseluruhan komunitas dan mengambil tindakan dalam usaha mewujudkan kebaikan umum (*public good*). Lebih jelas lihat Aristotle, *The Politics*, terj. J. A. Sinclair (Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, 1962). hal. 28.
- ¹¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971), hal. 302-303.
- ¹² Musa Asy'arie, *Keluar dari...*, hal. 64.
- ¹³ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 106-115.
- ¹⁴ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 52.
- ¹⁵ Musa Asy'arie, *NKRI...*, hal. 119.
- ¹⁶ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kebiasaan* (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 151.
- ¹⁷ Asyuri Ibn Chamim "Civic Education di Perguruan Tinggi Beberapa Catatan Pengalaman", dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki (Ed.), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Tim UII Press, 2003), hal. 5-6.

¹⁸ Musa Asy'arie, *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: LESFI, 2002), hal. 127.

Daftar Pustaka

- Alfian dan Nazaruddin Sjamauddin (Ed.). 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Almond Gabriel A. dan Sidney Verba. 1963. *The Civic Culture*. Princeton: Princeton University Press.
- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Aristotles. 1962. *The Politics*, terj. J. A. Sinclair Harmondsworth. Middlesex, England: Penguin Books.
- Chamim. Asy'uri Ibn. 2003. "Civic Education di Perguruan Tinggi Beberapa Catatan Pengalaman", dalam Sobirin Malian dan Sugarman Marzuki (Ed.). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Tim UII Press.
- Gaffar, Afan. 2005. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kebiasaan*. Jakarta: Kompas.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- Muhaimin, Yahya. 1991. "Persoalan Budaya Politik Indonesia", dalam Alfian dan Nazaruddin. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Musa Asy'arie. 2001a. *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*. Yogyakarta: LESFI.
- _____. 2001b. *Keluar Dari Krisis Multidimensi*. Yogyakarta: LESFI.
- _____. 2002. *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LESFI.
- _____. 2005. *NKRI, Budaya Politik dan Pendidikan*. Yogyakarta: LESFI.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Sjamauddin (Ed.). 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.